

TENTANG

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA					
1	Dokumen atau berkas atau arsip pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi
2	Data hukuman disiplin pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan dari pihak pihak yang berwenang Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan seluasnya proses audit	belum terjaminnya kebenaran informasi	mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang
4	kode akses (username dan password) aplikasi yang digunakan pada dinas Kominfo Kota Kupang	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik - UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik	tidak Terbatas	penyalagunaan oleh pihak yang tidak berwenang menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	melindungi kerahasiaan dokumen
5	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama belum ada tindak lanjut dan satuan kerja	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
GABUNGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG					
6	Arsip peta foto udara	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama didalamnya masih terkandung potensi keamanan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
7	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/wasta/ kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada Persetujuan dari Orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum/peembajakan	Menjaga lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin kemiluknya memperoleh manfaat ekonomi
8	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / ditandatangani	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperancar proses dan kebijakan pemerintah
9	Rencana pelaksanaan tular-memutar / peredaran barang daerah	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kegiatan yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat
10	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
11	Keputusan alat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihasilkan melalui surat yang bersifat tertutup	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
12	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian pengangkatan Kepala / Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai	Mendahulukan keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)
13	Berkas perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara perdata	Pasal 17 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 14	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat Proses Hukum/ oemvelidkan /oemvidkan; kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperancar/proses hukum / penyelidikan/penyidikan; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
14	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian luran dan pengangkatan PI Lurah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
15	Proses pengangkatan perangkat kelurahan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	(1) menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENCECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
16	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kepastian penyelidikan	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
17	Rancangan produk hukum daerah.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
18	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
19	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memelihara rahasia pribadi seseorang
20	Berita Acara pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
21	Asrip daftar orang yang masuk G05/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan/penyidikan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan / penyidikan; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
22	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum - Pasal 17 huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Mengungkap rahasia pribadi; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi data pribadi; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
23	Proses Peretapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
24	Penyusutan petugas pembuat naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
25	Data kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang membahayakan masyarakat	Pasal 17 huruf c, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
26	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Pasal 17 huruf f dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
27	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap delaznaran perda	Pasal 17 huruf a, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan; (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	(1) Mempercepat proses hukum / penyelidikan / penyidikan; (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
28	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
29	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
30	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	Pasal 17 huruf f dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
31	Dokumen rekam medis termasuk nomor teletisasi rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.
32	Rahasia kedokteran, yaitu Benar-benar dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
33	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
34	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
35	Hasil Diagnosa / Bredih Kasus Calon Karyawan (Penderita HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna Susila)	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
36	Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
37	Daftar rekam medik PNS	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas izin yang bersangkutan dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
38	Data tentang pemangand HIV/AIDS dan eits Wanita Yuna Susila	Pasal 17 huruf h, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas izin yang bersangkutan dan izin dari pemangku kepentingan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan (2) Dapat@herugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terganggu
39	Surat Perijinan / Ijin Usaha beserta dokumennya	Pasal 17 huruf f dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang@Komisi Informasi Publik	Campai dikabarkannya izin usaha; selama izin masih dipergunakan	Mengungkapkan@bata pribadi pemegang izin kebijakan	Menjaga privasi@bri pemegang izin
40	Data kekayaan alam	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Campai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Menpermutah pengel@aan dan pengaturan sumber daya alam
41	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Kelurahan	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Setelah kebijakan di@utuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
42	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	Pasal 17 huruf f dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang@Komisi Informasi Publik	Simpai@proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
43	Berita sandi	Pasal 17 huruf c, angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berita bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
44	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan@Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
45	Perangkat persandian khusus	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan@Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
46	Kunci sistem sandi	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
47	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan@Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
48	Jalur komunikasi VIP	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan@Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
49	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan@Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
50	Berita / Radiogram Rahasia	Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan@Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
51	Hasil ekplorasi detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	Pasal 17 huruf b, c, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Bila potensi sudah diungkapkan/dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengontrol kepentingan pribadi/ korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
52	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan terpublisnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatannya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dan persaingan yang tidak sehat
53	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	Pasal 17 huruf b, c, e, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan
54	Data Teknis Potensi Air Tanah	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
55	Wilayah/ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	Pasal 17 huruf b, c, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah penilaian oleh yang berwenang dapat diumumkan	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
56	Surat pengajuan Hak Merak, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses AKUMERKAM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
57	Data Debitur dana bergulir	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Asas/bermintaan rasionalitas	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
58	Bandwidth Management	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan / benar	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
59	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses sedang berlangsung	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
60	Lokasi Server	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
61	Internet/protocol/IP Address Private	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
62	Sistem Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf b, i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih digunakan	Membebaskan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/mengalkan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
63	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesiaap dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
64	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Mempercepat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
65	Dokumen penawaran kontrak	Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian / evaluasi penawaran
		Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik			
66	Skusman peka pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah			
		Pasal 17 huruf b, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
67	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan layanan produk pangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegah pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
68	Biodata individu dan data keluarga : a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas jin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
69	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas jin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
70	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas jin penerima hasil audit	Mengganggu ketenteraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketenteraman masyarakat
71	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNM dan program bantuan kepada pemerintah desa / Kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
72	Dokumen hasil pengawasan melekat (Waslat)	Pasal 17 huruf h, l, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas jin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
73	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas jin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pemyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
74	Laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk LHP Pemeriksaan Kasus, LHP review laporan keuangan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik,	Atas jin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga pemyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
75	Soal – soal ujian	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
76	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
77	Data hasil check Up perorangan PNS / Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Asas yin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
78	Data hasil tes potensi / kompetensi Pegawai Negeri Sipil / Baperjakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
79	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai selesai proses penempatan dan yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih terdidi
80	Data Rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
81	Notulen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
82	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
83	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dari jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
84	Aspek pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan jabatan struktural	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sesuai ketentuan untuk tetap ditatausahakan	Pertimbangan pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
85	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan di jaukan dan intervensi oleh semua pihak
86	SK pengangkatan, pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan di jaukan dan intervensi oleh semua pihak
87	Daftar nilai DP3 Pegawai Negeri Sipil dan SKP	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Asas yin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
88	Keputusan peninjauan Hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai turunnya peninjauan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
89	Keputusan ijin/referensi tentang Bercearaan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Sampai keluarnya putusan bercearaan	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fraksi	Menjaga obyektivitas putusan ijin
90	Dokumen pengangkatan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji/berkala c. Mutasi d. Pensiun	Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / mengubah kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
91	Biodata elektronik Pegawai Negeri Sipil lengkap	Nomor 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 17 huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
92	Data kepegawaian perorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
93	Aspek data perorangan Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
94	Daftar usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Selama usulan dipertimbangkan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
95	Daftar pejabat yang akan dilantik	Pasal 17 huruf d dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama proses penempatan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang membahayakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
96	Daftar nominasi (ranking) Pejabat Struktural	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai selesainya nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
97	Instrumen Tes, potensi /kompetensi Pegawai Negeri Sipil /Pejabat	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama masih berlaku dan dipertalikan dalam proses tes potensi/kompetensi	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
98	Identifikasi potensi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h, l, dan j	Selama masih berlaku dan dipertalikan dalam pengambilan keputusan	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	
99	Dokumen laporan/urail pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik	Sampai dengan telah Diverifikasi oleh aparaturnya / pengawasannya / auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
100	Proses pengelolaan administrasi keuangan secara keseluruhan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf d dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM KOTA KUPANG

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)	Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)	
1	Informasi mengenai rencana kerja dan anggaran 2023 dan 2024	pasal 17 UU KIP	dapat mengungkapkan rahasia kondisi keuangan dari perangkat daerah	Dapat menjaga rahasiaperangkat daerah	Tidak terbatas
2	Informasi mengenai laporan keuangan tahun 2023 dan 2024	pasal 17 UU KIP	dapat mengungkapkan rahasia kondisi keuangan dari perangkat daerah	Dapat menjaga rahasiaperangkat daerah	Tidak Tatas
3	Informasi data kepegawaian	Pasal 17 UU KIP	1. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan. 2. Dapat mengungkapkan rahasia surat-surat antar badan publik atau intra badan publik	1. Dapat menjaga rahasia pribadi 2. Dapat menjaga rahasia Perangkat Daerah	Tidak Terbatas

KELURAHAN LILIBA

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)	Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)	
1	Data pribadi pegawai Kelurahan Liliba	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
2	Data pribadi warga Kelurahan Liliba	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
3	Data ahli waris warga Kelurahan Liliba	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas

KELURAHAN BAKUNASE

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)	Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
1	Data diri pegawai dalam Kelurahan Bakunase, contoh NIP/NRP, Tempat Tanggal lahir, <u>Jusup Bahadi, diti</u>	Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 8	Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesuai jika ada permintaan data dari OPD yang membutuhkan data tersebut
2	Data diri pegawai dalam Kelurahan Bakunase, contoh NIK, <u>Jusup Bahadi, diti</u>	Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 8	Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesuai jika ada permintaan data dari OPD yang membutuhkan data tersebut
3	Data penerimaan bantuan Kelurahan Bakunase	Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 8	Karena tidak semua warga mendapatkan bantuan	Dibuka ketika ada bantuan masuk untuk dipergunakan sebagai kondisi status

KELURAHAN PENKASE

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)	Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)	
1	Data pribadi baik ASN maupun PTT Kelurahan Penkase Oletta	Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi diri yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
2	Data pribadi warga Kelurahan penkase Oletta	Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi diri yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
3	Data ahli waris warga Kelurahan penkase Oletta	Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi diri yang bersangkutan	Dapat menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas

KELURAHAN NAMOSAIN

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang di kecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)	Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)	
1	Aspek dinamis, aktif dan inaktif yang bersikapan tentang : a. Dokumen keuangan (SPJ) dan surat pencairan anggaran. B. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat. C. Surat-surat penting yang dirahasiakan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 dan UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan D7 (2)	Menghambat Proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak, mengikis kepentingan kepemilikan pribadi dan mengganggu proses	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum, melindungi kepentingan kepemilikan pribadi, melancarkan proses pelaksanaan kegiatan dan mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku
2	Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	memangankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat
3	Data pribadi penduduk (No. NIK dan KK)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1) dan (2)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Meilindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai berakhirnya kepegawaian Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang jln untuk memperoleh data pribadi penduduk
4	Daftar nilai SAP PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang PNS	Meilindungi rahasia pribadi seseorang PNS	Selama masih berlaku
5	Keputusan ijn/keterangan percearaan PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Meilindungi rahasia pribadi seseorang PNS, mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dan PNS yang diijutn hukuman disiplin
6	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang menganggu masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau menaak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitiv

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang	
Kepala Bidang Penyelidikan Layanan Informasi Publik	
Analisis Kebijakan Substansi Pengelolaan Informasi Publik	

ditetapkan di : di Kupang
pada tanggal : 10 Juni 2024

kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Kupang,

ARIANTIE M. BAUN, SE, M.Si
Pembina utama muda
NIP. 19700427 199703 2 004